

**MODEL EKONOMI KELEMBAGAAN PERTANIAN
ORGANIK BERBASIS MODAL SOSIAL
(STUDI KASUS DI DESA KETAPANG, KABUPATEN
SEMARANG)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

YOSUA AGUSTIN TRI PUTRA

NIM. 12020112140022

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yosua Agustin Tri Putra

Nomor Induk Mahasiswa : 12020112140022

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **MODEL EKONOMI KELEMBAGAAN
PERTANIAN ORGANIK BERBASIS
MODAL SOSIAL (STUDI KASUS DI
DESA KETAPANG, KABUPATEN
SEMARANG)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, M.S.

Semarang, 09 Desember 2016

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, M.S.)

NIP. 19580927 198603 1019

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Yosua Agustin Tri Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112140022
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan

Judul Skripsi : **MODEL EKONOMI KELEMBAGAAN
PERTANIAN ORGANIK BERBASIS MODAL
SOSIAL (STUDI KASUS DI DESA KETAPANG,
KABUPATEN SEMARANG)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Desember 2016

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, M.S. (.....)
2. Drs. Y Bagio Mudakir, MT. (.....)
3. Darwanto, S.E., Msi. (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt
NIP. 196708091992031001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosua Agustin Tri Putra

NIM : 12020112140022

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yosua Agustin Tri Putra, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Model Ekonomi Kelembagaan Pertanian Organik Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus di Desa Ketapang, Kabupaten Semarang)” adalah hasil karya saya sendiri. Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 09 Desember 2016
Yang Membuat Pernyataan

Yosua Agustin Tri Putra
NIM. 12020112140022

KUTIPAN YANG MEMPENGARUHI PENULIS

“Seorang murid yang ingin belajar, ingin tahu, tak akan memandang warna kulit atau bentuk muka guru yang memberikan apa yang diinginkan, yaitu pengetahuan. Guru sejati juga tidak akan memandang warna kulit muridnya, yang ikhlas dan sanggup menerima pelajarannya adalah sederajat di hati sanubarinya dengan anak kandungnya. Guru sejati ingin menurunkan pengetahuannya, seperti murid sejati yang juga harus menerima pengetahuan.” (Tan Malaka, 2014:117 dalam buku “Dari Penjara ke Penjara”)

“Beberapa bulan lagi saya akan pergi dari dunia mahasiswa. Saya meninggalkannya dengan hati berat dan tidak tenang. Masih terlalu banyak kaum munafik yang berkuasa. Orang yang pura-pura suci dan mengatasnama-Tuhan-kan segala-galanya, sampai-sampai dansa dan naik gunung dibawa-bawa pada soal agama. Masih terlalu banyak serigala-serigala berbulu domba. Buaya-buaya judi, tukang-tukang lacur (baiklah kita terus terang bahwa cukup banyak mahasiswa yang sering ke tempat pelacuran), tukang-tukang nyontek dan bolos yang berteriak-teriak tentang moral generasi muda, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap rakyat. Masih terlalu banyak mahasiswa yang bermental sok kuasa. Merintih kalau ditekan, tetapi menindas kalau berkuasa. Mementingkan golongan, ormas, teman seideologi dan lain-lain. Setiap tahun datang adik-adik saya dari sekolah menengah. Mereka akan jadi korban-korban baru untuk ditipu oleh tokoh-tokoh mahasiswa semacam tadi.” (Soe Hok Gie, 1968 dalam artikel “Mimpi-Mimpi Seorang Mahasiswa Tua”).

“Kita mau menjadi bangsa yang bersatu-padu,
Takkan terpisah-pisah dalam bahaya maupun sengsara,
Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, seperti leluhur kita,
Memilih mati daripada hidup sebagai budak,
Kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Tinggi,
Dan tak gentar akan kuasa manusia.”
(Bung Hatta, 1945 “Kita Sebangsa dan Setanah Air”)

PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK
BANGSA DAN NEGARAKU
INDONESIA**

ABSTRACT

Ketapang Village, precisely in Susukan subdistrict, has been a village which has high potential to develop organic farming. The development points to the likelihood that welfare might be improved. However, a couple of problems might be faced by the farmers. It comprises of: agricultural land, nature, society, and science technology.

Aims of this study were: (i) to analyze the conditions of geographical, economic, and social cultural; (ii) to explain the agricultural land, nature, society, and science technology in organic rice farming; (iii) to explain the role of social capital in overcoming the problems of organic rice farming; and (iv) to construct an economic model based on organic agricultural institutional of social capital. Qualitative approach is employed to explore the study The data is used in this research was primary and secondary data. The primary data was obtained through interviews, documentation, and observation of organic rice farming and social capital in Ketapang Village. The secondary data was obtained through documents related to the organic rice farming, institutional economics, and social capital, such as the literature study from scientific publications and data from the BPS.

The results of this research showed: (i) an inquiry to the conditions of geographical, economic, social cultural in Ketapang village which supports the development of organic agriculture; (ii) that agricultural land, nature, society, and science and technology are major problems in the development of organic farming; (iii) that social capital comes in the form of values, norms, beliefs, and social networks which play important role in overcoming problems of agricultural land, nature, society, and science and technology in the development of organic agriculture; and (iv) that institutional economics of organic farming based on social capital in Ketapang Village is based on four important points, which are the stakeholders, institutional aspects in developing Organic Agriculture (formal and informal rules), development of social capital based organic agriculture, and the goals to be achieved (economic, social, and environmental).

Keywords : Organic Agriculture, Institutional Economics, Social Capital

ABSTRAK

Desa Ketapang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi untuk mengembangkan pembangunan pertanian organik di Kecamatan Susukan. Pembangunan pertanian organik dikembangkan di Desa Ketapang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dari petani. Namun, pembangunan pertanian organik di Desa memiliki empat permasalahan utama, yaitu permasalahan lahan pertanian, alam, masyarakat, dan iptek.

Tujuan dari penelitian ini ada empat, yaitu (i) menganalisis kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya di Desa Ketapang; (ii) menjelaskan lahan pertanian, alam, masyarakat, dan iptek dalam pertanian padi organik di Desa Ketapang; (iii) menjelaskan peran modal sosial dalam mengatasi permasalahan pertanian padi organik di Desa Ketapang; dan (iv) membentuk model ekonomi kelembagaan pertanian organik berbasis modal sosial di Desa Ketapang. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terhadap kondisi pertanian padi organik dan modal sosial di Desa Ketapang. Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui dokumen yang terkait dengan pertanian padi organik, ekonomi kelembagaan, dan modal sosial, seperti studi literatur dari publikasi ilmiah dan data dari BPS.

Hasil penelitian ini ada empat, yaitu (i) kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya di Desa Ketapang mendukung untuk pembangunan pertanian organik; (ii) lahan pertanian, alam, masyarakat, dan iptek merupakan masalah di dalam pembangunan pertanian organik di Desa Ketapang; (iii) modal sosial dalam bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan jaringan sosial berperan penting dalam mengatasi permasalahan lahan pertanian, alam, masyarakat, dan iptek di dalam pembangunan pertanian organik di Desa Ketapang; dan (iv) model ekonomi kelembagaan pertanian organik berbasis modal sosial di Desa Ketapang berdasarkan empat *point* penting, yaitu *stakeholders* yang berperan, kelembagaan pertanian organik di Desa Ketapang (aturan formal dan informal), pembangunan pertanian organik berbasis modal sosial, dan tujuan yang ingin dicapai (pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan).

Kata Kunci: Pertanian Organik, Ekonomi Kelembagaan, Modal Sosial

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, dan Anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model Ekonomi Kelembagaan Pertanian Organik Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus di Desa Ketapang, Kabupaten Semarang)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memberikan saya kewarganegaraan Indonesia.
2. Yesus Kristus yang telah memberikan saya kepercayaan kristen.
3. Dr. Suharnomo, SE., M.Si., selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
5. Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, M.S, selaku dosen pembimbing, yang telah banyak sekali memberikan bimbingan, motivasi, arahan, petunjuk, kemudahan, dan ilmu yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Dr. Nugroho SBM, MSP, selaku dosen wali yang selalu memberikan inspirasi dalam menulis.
7. Darwanto, SE., MSi, selaku dosen yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu dalam penulisan skripsi.

8.Seluruh Dosen, Staf Pengajar, Staf Kemahasiswaan, TU, Staf Perpustakaan,dan Staf Keamanan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang bermanfaat bagi penulis.

9.Ayah dan Ibu saya, Rommel Siburian dan Tiur Helmida Sitanggung, yang selalu memberikan doa, tenaga, waktu, dan pemikiran kepada penulis.

10.Saudara saya, Todona Siburian, Pasca Siburian, dan Immanuel Siburian, yang telah mendukung dan menjalankan tanggung jawabnya dalam pembiayaan kuliah penulis.

11.Sahabat saya Dheo Mahendra “si Jarang Mandi”, Khairul Arifin “si Profesor”, Kama Aditya Baskara “si Galauers”, King James Silaen “si Pendeta”, dan Antonius Padmanaba “si Pemalu”.

12.Rekan-rekan Laskar Diponegoro yang telah menemani saya dalam berlomba debat ataupun karya tulis ilmiah nasional: Mustika, Alan, Khairunnas, Husain, Mayla, dan Bekti Ayu. Terimakasih atas pengorbanan waktu, pemikiran, dan tenaganya.

13.UPK KESMES dan HMJ IESP angkatan 2012 yang telah berbagi pengalaman berorganisasi.

14.Teman-teman KKN Tematik Desa Sumur, Kabupaten Kendal yang telah memberikan pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian di desa.

15.Senior yang telah memberikan ilmu dan wejangan kepada penulis: Ghana Atma (Undip 2011), Faiq Fuadi (Undip 2011), Moh Hami Furkon (Undip 2011), M Fahmi Priyatna (Undip 2011), Ratna Hartiningtyas (Undip 2011),

Denny Iswanto (UIN Jakarta 2009), Dwi Ardi Sugiono (Brawijaya 2009), Deni Adiya Susanto (Brawijaya 2010), Andiga Kusuma Nur Ichsan (Airlangga 2010), Yessy Yuliana Amalia (Airlangga 2010), dan Danang Waskito (Universitas Negeri Yogyakarta 2010).

16. Bapak Mustofa, Sopri, Muslih, Mahmudi, Muhyidin, Tamimi, Taufiq, Basuki, Muhammad Niam, Rifai, Iswanto, Wingit Santoso, Muhammad Mahfud, Bambang Trisetyo Eddy, dan ibu Nurul yang telah bersedia berbagi informasi untuk keperluan pengumpulan data.

17. Bapak dan Ibu Samrozi sebagai ayah dan ibu angkat saya di Desa Ketapang.

18. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan semoga kekurangan dalam skripsi ini menjadi bahan pembelajaran untuk penelitian di masa mendatang.

Semarang, 09 Desember 2016
Penulis

Yosua Agustin Tri Putra
12020112140022

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KUTIPAN DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	30
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	36
1.4 Sistematika Penulisan.....	37
BAB II TELAAH PUSTAKA.	39
2.1 Landasan Teori dan Peneliritan Terdahulu	39
2.1.1 Pembangunan Perdesaan.....	39
2.1.2 Ekonomi Kelembagaan	43
2.1.3 Modal Sosial	53
2.1.4 Pertanian Organik.....	66
2.1.5 Lahan Petanian, Alam, Masyarakat, dan Iptek dalam Pertanian	70
2.1.6 Penelitian Terdahulu	76
2.2 Kerangka Pemikiran.....	83
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	85
3.1 Pendekatan Penelitian	85

3.2	Jenis Penelitian.....	87
3.3	Jenis dan Sumber Data	90
3.4	Metode Pengumpulan Data	91
	3.4.1 Metode Pemilihan Subjek/ Informan Penelitian	92
3.5	Metode Analisis Data	93
3.6	Lokasi dan Waktu Penelitian	95
3.7	Batasan dan Fokus Masalah Penelitian	96
3.8	Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian.....	97
BAB IV PEMBAHASAN		100
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	100
	4.1.1 Gambaran Umum Desa Ketapang	108
	4.1.2 Gambaran Perekonomian Petani Organik PP Al Barokah Organik di Desa Ketapang.....	113
	4.1.3 Gambaran Modal Sosial Petani Organik PP Al Barokah di Desa Ketapang	133
	4.1.3.1 Nilai Sebagai Modal Sosial.....	134
	4.1.3.2 Norma Sebagai Modal Sosial.....	139
	4.1.3.3 Kepercayaan Sebagai Modal Sosial	142
	4.1.3.4 Jaringan Sosial Sebagai Modal Sosial	144
4.2	Lahan Pertanian, Alam, Masyarakat, dan Iptek dalam Pertanian Organik PP Al Barokah	149
	4.2.1 Lahan Pertanian dalam Pertanian Padi Organik.....	149
	4.2.2 Alam dalam Pertanian Padi Organik	152
	4.2.3 Masyarakat dalam Pertanian Padi Organik	154
	4.2.4 Iptek dalam Pertanian Organik	157
4.3	Analisis Peran Modal Sosial dalam Mengatasi Permasalahan Lahan Pertanian, Alam, Masyarakat, dan Iptek dalam Pertanian Organik.....	159
	4.3.1 Modal Sosial dalam Mengatasi Permasalahan Lahan	159
	4.3.2 Modal Sosial dalam Mengatasi Permasalahan Alam	164

4.3.3 Modal Sosial dalam Mengatasi Permasalahan Masyarakat	167
4.3.4 Modal Sosial dalam Mengatasi Permasalahan Iptek	169
4.4 Model Ekonomi Kelembagaan Pertanian Organik di Desa Ketapang.....	177
4.5 Diskusi	206
BAB V PENUTUP	215
5.1 Kesimpulan	215
5.2 Keterbatasan penelitian	219
5.3 Saran	219
DAFTAR PUSTAKA	221
DAFTAR LAMPIRAN	228

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015.....	3
Tabel 1.2	: Produk Domestik Bruto Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012-2015 (Miliar Rupiah).....	6
Tabel 1.3	: Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Indonesia Tahun 2014-2016 (Juta orang)	8
Tabel 1.4	: Nilai Perdagangan Ekspor ke Dalam dan Luar Asia Tenggara untuk Komoditas Pertanian Tahun 2011	9
Tabel 1.5	: Peringkat Produk Pertanian Indonesia.....	10
Tabel 1.6	: Alih Guna, Penambahan, dan Neraca Lahan Sawah Tahun 1981-2012 (Ha)	11
Tabel 1.7	: Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang Dikuasai Tahun 2003 dan 2013	12
Tabel 1.8	: Karakteristik dari Rumah Tangga Petani Beras di Indonesia Tahun 2007	13
Tabel 1.9	: Perubahan Komposisi Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan Tahun 1983, 1993, Dan 2002	15
Tabel 1.10	: Nilai Perdagangan Impor dari Dalam dan Luar Asia Tenggara untuk Komoditas Pertanian Tahun 2011	16
Tabel 1.11	: Produk Domestik Bruto Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012-2015 (Miliar Rupiah).....	17
Tabel 1.12	: Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2014-2015 (Orang)	19
Tabel 1.13	: Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang Dikuasai.....	21
Tabel 1.14	: Luas Lahan Pertanian Organik Dunia Tahun 2014	23
Tabel 2.1	: Perubahan Paradigma Pembangunan Pertanian dan Perdesaan dalam Pengurangan Kemiskinan	40
Tabel 2.2	: Perbedaan antara Pendekatan Pembangunan dan Pendekatan Pemberdayaan	41

Tabel 2.3	: Iktisar Ekonomi Neoklasik dan Ekonomi Kelembagaan	45
Tabel 2.4	: Empat Sumber dari Modal Sosial	57
Tabel 2.5	: Dimensi Struktur dan Kognisi Modal Sosial	58
Tabel 2.6	: Perbedaan <i>Bonding Social Capital</i> dan <i>Bridging Social Capital</i>	60
Tabel 2.7	: Perbandingan antara Pertanian Organik dengan Konvensional dari sisi Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan.....	69
Tabel 2.8	: Penelitian Terdahulu	77
Tabel 3.1	: Informan Penelitian.....	93
Tabel 4.1	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)	101
Tabel 4.2	: Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Semarang Tahun 2015 (Orang)	103
Tabel 4.3	: Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor di Kabupaten Semarang Tahun 2014 - 2015.....	106
Tabel 4.4	: Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Sawah di Kecamatan Susukan Tahun 2013-2015	107
Tabel 4.5	: Jumlah Rumah tangga Miskin di Desa Ketapang Tahun 2013 dan 2014.....	112
Tabel 4.6	: Harga Jual Beras Organik PP Al Barokah	117
Tabel 4.7	: Jumlah Produksi Beras PP Al Barokah Tahun 2014 (Ton) ..	123
Tabel 4.8	: Laporan Keuangan Paguyuban Petani Al Barokah September 2015-Februari 2016 (Rupiah)	130
Tabel 4.9	: Pendapatan Petani PP Al Barokah Periode April-Agustus 2016 (Rupiah)	131
Tabel 4.10	: Pendapatan Petani Anorganik Periode April-Agustus 2016 (Rupiah)	132
Tabel 4.11	: Nilai, Norma, Kepercayaan, dan Jaringan Petani Organik di Desa Ketapang	148

Tabel 4.12	: Jumlah dan Luas Lahan Petani Paguyuban Al Barokah di Desa Ketapang Tahun 2014.....	150
Tabel 4.13	: Modal Sosial Petani Al Barokah dalam Mengatasi Permasalahan Pertanian Organik di Desa Ketapang.....	175
Tabel 4.14	: Peran Antar Stakeholders dalam Pembangunan Pertanian Organik di Desa Ketapang.....	187
Tabel 4.15	: Aspek Kelembagaan di dalam Pembangunan Pertanian Organik di Desa Ketapang.....	194

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	: Laju Pertumbuhan PDB Nasional dan Pertanian Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2012-2015.....	7
Grafik 1.2	: Nilai Tukar Petani Indonesia Juni 2015-Juni 2016.....	14
Grafik 1.3	: Nilai Tukar Petani Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2015	20
Grafik 1.4	: Luas Lahan Organik Indonesia.....	25
Grafik 4.1	: Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Semarang 2010-2014 (Persen)	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Sawah Pertanian Padi Organik di Desa Ketapang	27
Gambar 2.1	: Cabang Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru	50
Gambar 2.2	: Keterkaitan <i>Governance</i> dengan Modal Sosial <i>Bridging</i>	62
Gambar 2.3	: Keuntungan dan Ketugian dalam Transaksi dengan Modal Sosial	64
Gambar 2.4	: Kerangka Pemikiran	84
Gambar 3.1	: Proses Analisis Induktif	86
Gambar 3.2	: Pendekatan Penelitian Kualitatif Berdasarkan Fokusnya	88
Gambar 3.3	: Teknik Analisis Data <i>Interactive Model Milles</i> dan <i>Huberman</i>	94
Gambar 3.4	: Realitas Berlapis dalam Penelitian Kualitatif	96
Gambar 4.1	: Peta Kabupaten Semarang	100
Gambar 4.2	: Logo Paguyuban Petani Al Barokah	114
Gambar 4.3	: Proses Sertifikasi Pertanian Organik Al Barokah Oleh INOFICE	116
Gambar 4.4	: Tepung Hitam dan Katul Merah Padi Organik	119
Gambar 4.5	: Struktur organisasi Paguyuban Al Barokah	120
Gambar 4.6	: Penggilingan Padi Kelompok Tani Al Mazroah dan Al Barokah 1	125
Gambar 4.7	: Pemasaran Paguyuban Petani Al Barokah	127
Gambar 4.8	: Proses Pertanian Organik di Desa Ketapang	129
Gambar 4.9	: Modal Sosial Pertanian Organik di Desa Ketapang	133
Gambar 4.10	: Kegiatan Merti Dusun di Dusun Karang Asem	136
Gambar 4.11	: Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)	138
Gambar 4.12	: Pertemuan Rutin Kelompok Tani Dewi Sri dan Al Mazroah	146
Gambar 4.13	: Tanggul Aliran Induk Air Jebol	154
Gambar 4.14	: Peran Traktor, Alat Penggiling Padi, dan Website dalam PP Al Barokah	157

Gambar 4.15 : Proses Penggilingan Padi Organik di Kelompok Tani Al Mazroah	161
Gambar 4.16 : Tumbuhan Pendamping di Sawah Petani Organik	164
Gambar 4.17 : Model Ekonomi Kelembagaan Pertanian Organik Berbasis Modal Sosial di Desa Ketapang.....	177
Gambar 4.18 : Pembangunan Pertanian Organik berbasis Modal Sosial dalam Mengembangkan Potensi di Desa Ketapang.....	196
Gambar 4.19 : Limbah Daman, Bekatul, dan Sekam	199
Gambar 4.20 : Modal Sosial dalam Mengatasi Permasalahan Pertanian Organik PP Al Barokah	201
Gambar 4.20 : Tujuan Model Ekonomi Kelembagaan Pertanian Organik Berbasis Modal Sosial di Desa Ketapang.....	206

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	: Pedoman Wawancara.....	229
Lampiran B	: Pengkodean	234
Lampiran C	: Wawancara <i>Merti</i> Dusun	278
Lampiran D	: Dokumentasi Lapangan	280
Lampiran E	: Surat Ijin Penelitian	287

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan yang selama ini diterapkan di negara berkembang telah menuai berbagai kritik. Salah satu kritik terhadap konsep pembangunan tersebut adalah penggunaan paradigma dan pendekatan ekonomi yang berlebihan, di mana konsep pembangunan tersebut mengukur keberhasilan pembangunan hanya dengan indikator-indikator ekonomi secara fisik. Konsep pembangunan ekonomi ini meyakini bahwa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan tercipta *trickle down effect* dari ekonomi skala besar menuju ekonomi skala kecil (Malik, 2015:2; Putra, 2016a).

Konsep pembangunan ekonomi yang mengagungkan konsep *trickle down effect* di Indonesia dimulai semenjak Orde Baru. Pada awalnya, konsep pembangunan ini menuai banyak pujian dari berbagai kalangan, bahkan Bank Dunia (1993) memasukan Indonesia ke dalam delapan negara dengan perekonomian ajaib karena pertumbuhannya yang tinggi. Namun, hanya berselang empat tahun julukan negara dengan perekonomian ajaib tersebut hancur. Hal tersebut ditandai dengan tingkat kemiskinan Indonesia yang meningkat drastis dari 34,01 juta jiwa (17,47 persen) pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta jiwa (24,2 persen) pada tahun 1998.

Tingkat kemiskinan tersebut menggambarkan kemunduran ekonomi Indonesia selama sekitar 15 tahun karena jumlah penduduk miskin tersebut hampir sama dengan penduduk miskin Indonesia pada tahun 1981, yaitu sebanyak 40,6 juta jiwa. Berdasarkan pengalaman tersebut, pembangunan ekonomi yang mengagungkan konsep *trickle down effect* jelaslah keliru bila dipertahankan. Kekeliruan sudut pandang pembangunan ekonomi tersebut ialah konsep pembangunan yang terlalu difokuskan untuk membangun sektor industri perkotaan dengan harapan secara otomatis akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memperbaiki masalah kemiskinan.

Pada kenyataannya, pembangunan tersebut ternyata menghasilkan penghisapan (*backwash effect*) dan bukanlah efek tetesan ekonomi (*trickle down effect*) seperti yang diharapkan. Konsep pembangunan ekonomi ini berdampak pada semakin termarginalkannya posisi perdesaan. Kondisi termarginalkannya desa dalam pembangunan tersebut dapat dilihat dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM merupakan hasil rata-rata dari tiga indikator, yakni Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) (Putra, 2016a).

Hasil dari nilai rata-rata IDM desa di Indonesia tahun 2015 adalah sebesar 0,566. Hasil ini diperoleh dengan rata-rata dari nilai IKL sebesar 0,6473, IKE sebesar 0,4564, dan IKS sebesar 0,5931. Hasil IDM tersebut menegaskan bahwa status perdesaan Indonesia hingga tahun 2015 masih tergolong ke dalam status

desa yang tertinggal. Bahkan, tingkat ketahanan ekonomi perdesaan (IKE) di Indonesia masih berada dalam status desa sangat tertinggal (Putra, 2016b).

Tabel 1.1
Jumlah Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015 (Juta Orang)

No	Daerah	Tahun	Jumlah penduduk miskin (Juta orang)	Penduduk miskin (persen)
1.	Perkotaan	Maret 2015	10,65	8,29
		September 2015	10,62	8,22
2.	Perdesaan	Maret 2015	17,94	14,21
		September 2015	17,89	14,09
3.	Perkotaan +Perdesaan	Maret 2015	28,59	11,22
		September 2015	28,51	11,13

Sumber: BPS (2016a)

Jumlah perdesaan di Indonesia yang tertinggal dari sisi proporsi masih sangat banyak, yaitu mencapai 47.045 desa atau sebesar 63,82%. Jumlah ini terdiri dari jumlah desa yang tertinggal mencapai 33.592 desa (45,57%) dan desa yang sangat tertinggal mencapai 13.453 desa (18,25%). Dengan kondisi perdesaan tersebut, tidaklah mengherankan apabila penduduk miskin di perdesaan meningkat sebesar 2,99 % dibandingkan dengan tahun 2014 (Kemendes, 2015).

Jumlah penduduk miskin di perdesaan meningkat dari 17,37 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 17,89 juta jiwa pada tahun 2015 (BPS, 2016a). Peningkatan kemiskinan ini seharusnya menjadi lampu kuning bagi pengambil kebijakan karena kemiskinan pada dasarnya menggambarkan keterbelakangan, keterpurukan, ketertinggalan, dan ketidakberdayaan (Khomsan, *et al*, 2015:9).

Bahkan, kemiskinan dapat juga mencerminkan kegagalan dan kerapuhan dari konsep pembangunan ekonomi Indonesia selama ini (Arifin, 2015:11-12).

Pembangunan di negara berkembang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari wilayah perdesaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk negara berkembang yang berstatus penduduk miskin berada di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan di negara berkembang baru bisa dikatakan berhasil apabila pembangunan telah menjangkau sebagian besar penduduk di perdesaan tersebut sehingga masyarakat perdesaan dapat melakukan mobilitas sosial-ekonomi (Yustika dan Rukavina, 2015:1).

Pendapat senada disampaikan oleh FAO (2015). FAO (2015) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara kemiskinan perdesaan dan sektor pertanian. Hubungan yang erat tersebut dapat dilihat pada negara-negara, seperti Amerika Tengah, Asia Selatan, Afrika sub-Sahara. Sektor pertanian di negara-negara tersebut berkontribusi menyumbang sekitar 10 persen dari PDB dan sekitar 45 persen dari total angkatan kerja. Oleh karena itu, FAO (2015) berpendapat perlunya dilakukan melakukan pembangunan pertanian di perdesaan.

Meier (1995) berpendapat bahwa terdapat empat peran pokok sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu (i) menyuplai bahan makanan pokok masyarakat dan bahan baku bagi sektor ekonomi lainnya; (ii) menyediakan *surplus* produksi yang dapat dikonversi dan diinvestasikan dalam perekonomian; (iii) membeli barang konsumsi dari sektor lain; dan (iv) menghasilkan penerimaan devisa dari ekspor sehingga melindungi nilai devisa.

Sejalan dengan Meier, Atmanto (1995:37) juga berpendapat bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan empat alasan, yaitu *pertama*, sektor pertanian adalah sektor yang memiliki kewajiban sebagai penyedia pangan masyarakat. *Kedua*, sektor pertanian merupakan sektor penyumbang bahan baku (*raw material*) bagi sektor industri. *Ketiga*, sektor pertanian memberikan kontribusi dalam devisa negara dengan melakukan ekspor. Dan *keempat*, pertanian adalah sektor yang menyediakan kesempatan kerja bagi mayoritas tenaga kerja di perdesaan.

Indonesia hingga saat ini merupakan negara yang terkenal sebagai negara agraris. Julukan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di Indonesia yang tercermin di dalam tiga indikator utama, yaitu (i) kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha; (ii) jumlah tenaga kerja yang pekerjaannya utamanya sebagai petani; dan (iii) kontribusi sektor pertanian dalam ekspor perdagangan Indonesia.

Pertama, sektor pertanian mempunyai peran sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor pertanian hingga tahun 2015 masih berperan sebagai tiga besar sektor usaha penyumbang PDB di Indonesia. Berdasarkan harga berlaku, pertumbuhan sektor pertanian semakin meningkat dari tahun ke tahun, yakni menyumbang sebesar Rp 1.152,3 triliun pada tahun 2012, Rp 1.275 triliun pada tahun 2013, Rp 1.410,7 triliun pada tahun 2014, dan Rp 1.560 Triliun pada tahun 2015.

Tabel 1.2
Produk Domestik Bruto Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun
2012-2015 (Miliar Rupiah)

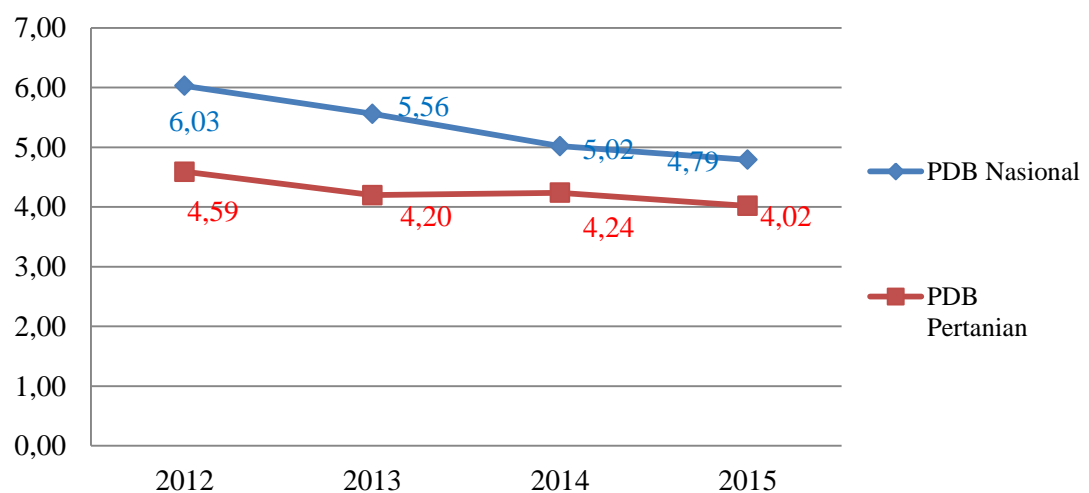
PDB Lapangan Usaha	Harga Konstan 2010				Harga Berlaku			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.039.440,7	1.083.141,8	1.129.052,7	1.174.456,8	1.152.262,1	1.275.048,4	1.409.655,7	1.560.399,3
B. Pertambangan dan Penggalian	771.561,6	791.054,4	796.711,6	756.239,2	1.000.307,6	1.050.745,8	1.042.900,9	879.399,6
C. Industri Pengolahan	1.697.787,2	1.771.961,9	1.853.688,2	1.932.457,4	1.848.150,9	2.007.426,8	2.219.441,4	2.405.408,9
D. Pengadaan Listrik dan Gas	84.393	88.805,1	93.755,9	94.894,8	95.637,8	98.686,8	114.617,9	131.264,2
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.329,8	6.539,9	6.923,5	7.420,2	6.603,8	7.209	7.887,1	8.606
F. Konstruksi	728.226,4	772.719,6	826.615,6	881.583,9	805.208,1	905.990,5	1.041.949,5	1.193.346,1
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.067.911,5	1.119.272,1	1.177.048,6	1.206.074,7	1.138.484,4	1.261.145,6	1.420.054,3	1.534.067,3
H. Transportasi dan Pergudangan	284.662,6	304.506,2	326.933	348.775,6	313.156,2	375.305,9	466.968,9	578.963,9
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	228.232,6	243.748,3	257.815,5	269.054,5	252.612,3	289.498,3	321.062,1	341.790,2
J. Informasi dan Komunikasi	316.278,7	349.150,1	384.407,4	423.063,5	311.362,4	341.009,4	369.415	406.887,6
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	280.896,1	305.515,1	319.825,5	347.095,7	320.534,3	370.131,9	408.438,8	464.734,6
L. Real Estate	229.254,2	244.237,5	256.440,2	268.811,4	237.913,9	264.275	294.573,4	329.796,9
M,N. Jasa Perusahaan	116.293,3	125.490,7	137.795,3	148.395,5	127.724,2	144.604,1	165.990,6	190.267,9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	282.235,3	289.448,9	296.329,7	310.393,9	340.567,6	372.195	404.629,6	450.733,1
P. Jasa Pendidikan	232.704,3	250.016,2	263.889,6	283.540	270.372,3	307.862,3	342.063,2	388.682,6
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78.380,1	84.621,4	91.357,1	97.840,8	86.235,4	96.881,3	109.147,2	123.410,3
R,S,T,U. Jasa lainnya	115.675,4	123.083,1	134.070,1	144.902,4	122.566,2	140.315,5	163.548,8	190.579,5
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	7.560.262,8	7.953.312,3	8.352.659,5	8.695.000,3	8.429.699,5	9.308.331,6	10.302.344	11.178.338
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	166.820,6	203.185,5	213.611,7	281.931,2	186.005	237.802,4	263.472,9	362.451,8
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	7.727.083,4	8.156.497,8	8.566.271,2	8.976.931,5	8.615.704,5	9.546.134	10.565.817	11.540.789,8

Sumber: BPS (2016)

Permasalahannya adalah laju pertumbuhan sektor pertanian dan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDB yang semakin menurun dari tahun ke

tahun. Laju pertumbuhan sektor pertanian Indonesia dari tahun 2012-2015 mengalami perlambatan, yaitu dari 4,59 persen pada tahun 2012; 4,2 persen pada tahun 2013; 4,24 persen pada tahun 2014; dan 4,02 persen pada tahun 2015. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bila sektor pertanian tidak lagi menjadi sektor yang paling besar menyumbang PDB Indonesia.

Grafik 1.1
Laju Pertumbuhan PDB Nasional dan Pertanian Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2012-2015



Sumber: BPS (2016)

Sejalan dengan laju pertumbuhan, persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDB juga mengalami penurunan. Persentase kontribusi sektor pertanian pada tahun 1968 masih sebesar 51 persen. Namun, persentase pertanian telah menurun drastis menjadi 14,43 persen pada tahun 2013. Secara rata-rata, persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dari tahun 2007-2013 mengalami penurunan sebesar 1,56 persen (BPS, 2016).

Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap jumlah tenaga kerja di Indonesia. Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian adalah sebanyak 38,29 juta orang dari total 120,65 juta orang yang bekerja pada Februari 2016. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja apabila dibandingkan sektor lainnya, seperti sektor perdagangan dan industri yang berjumlah 28,50 juta orang dan 15,97 juta orang. Namun, permasalahannya adalah jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian ini sedang mengalami *trend* penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 40,83 juta pada Februari 2014 dan 40,12 juta pada Februari 2015 (BPS, 2016).

Tabel 1.3
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Indonesia Tahun 2014-2016 (Juta orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016	
	Februari	%	Agustus	%	Februari	%	Agustus	%	Februari	%
1. Pertanian	40,83	34,55	38,97	34	40,12	33,2	37,75	32,88	38,29	31,74
2. Industri	15,39	13,02	15,26	13,31	16,38	13,55	15,25	13,28	15,97	13,24
3. Konstruksi	7,21	6,1	7,28	6,35	7,72	6,39	8,21	7,15	7,71	6,39
4. Perdagangan	25,81	21,84	24,83	21,66	26,65	22,05	25,68	22,37	28,5	23,62
5. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,33	4,51	5,11	4,46	5,19	4,29	5,11	4,45	5,19	4,3
6. Keuangan	3,19	2,7	3,03	2,64	3,65	3,02	3,27	2,85	3,48	2,88
7. Jasa Kemasyarakatan	18,48	15,64	18,42	16,07	19,41	16,06	17,94	15,62	19,79	16,4
8. Lainnya	1,93	1,63	1,73	1,51	1,73	1,43	1,61	1,4	1,72	1,43
9. Jumlah	118,17	100	114,63	100	120,85	100	114,82	100	120,65	100

Sumber: BPS (2016)

Ketiga, kontribusi sektor pertanian dalam ekspor perdagangan Indonesia. Indonesia pada awal tahun 2016 telah resmi memasuki era Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA). Subejo (2014) melakukan penelitiannya terhadap perkembangan ekspor dan impor komoditas pertanian di kawasan ASEAN pada tahun 2011. Dalam penelitian tersebut, Indonesia berada pada peringkat kedua di kawasan ASEAN dalam ekspor perdagangan pertanian. Total ekspor Indonesia baik ke negara ASEAN maupun luar ASEAN adalah sebesar US\$ 36.392.961.000. Dibandingkan negara ASEAN lainnya, total ekspor Indonesia hanya kalah tipis apabila dibandingkan Thailand yang total nilai ekspornya mencapai US\$ 36.495.525.000.

Tabel 1.4
Nilai Perdagangan Ekspor ke Dalam dan Luar Asia Tenggara untuk
Komoditas Pertanian Tahun 2011 (dalam US\$ 1.000)

Nomor	Negara	Nilai Ekspor ke Asia Tenggara		
		Ekspor ke Asia Tenggara	Ekspor ke Luar Asia Tenggara	Total Ekspor
1.	Brunei	-	6.099	6.099
2.	Kamboja	-	231.644	231.644
3.	Indonesia	6.664.524	29.728.437	36.392.961
4.	Laos	-	184.906	184.906
5.	Malaysia	5.823.192	29.555.984	35.379.176
6.	Myanmar		612.990	612.990
7.	Filipina	654.034	4.753.651	5.407.685
8.	Singapura	3.923.079	8.678.051	12.601.130
9.	Thailand	6.788.553	29.706.972	36.495.525
10.	Vietnam	-	10.519.620	10.519.620

Sumber: Subejo, et al (2014:19)

Tingginya nilai ekspor komoditas pertanian di Indonesia tidak terlepas dari baiknya kualitas daya saing komoditas pertanian Indonesia di pasar internasional.

Berdasarkan data dari *World in Figure* (dalam Yustika dan Rukavina, 2015:40), Indonesia setidaknya memiliki 11 komoditas pertanian yang kualitasnya diakui oleh dunia. Terkhusus pada sektor pangan, komoditas padi Indonesia meraih peringkat tiga dunia. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat bersaing di era persaingan global.

Tabel 1.5
Peringkat Produk Pertanian Indonesia

Nomor	Komoditas	Peringkat Dunia
1.	Biji-bijian	6
2.	Teh	6
3.	Kopi	4
4.	Total Karet (+sintetis)	4
5.	Beras	3
6.	Cokelat	3
7.	Lada Hitam	3
8.	Minyak sawit	2
9.	Karet alam	2
10.	Lada putih	1
11.	Pala	1

Sumber: World in Figure (dalam Yustika dan Rukavina, 2015: 40)

Di balik ketiga indikator tersebut, pembangunan pertanian di Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan yang perlu dibenahi. Permasalahan pertanian Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (i) luas kepemilikan lahan petani; (ii) kondisi kesejahteraan petani; dan (iii) impor komoditas pertanian. *Pertama*, luas kepemilikan lahan petani. Saat ini, luas lahan pertanian terus mengalami penyempitan akibat konversi lahan pertanian ke lahan bukan pertanian. Laju konversi lahan sawah bahkan bisa mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sementara itu, kemampuan dari pemerintah dalam mencetak lahan

pertanian baru masih terbatas, yaitu hanya mencapai 40 ribu hektar per tahun dalam beberapa tahun belakangan ini. Dengan demikian, laju konversi lahan pertanian yang belum dapat diimbangi laju pencetakan sawah baru (Kementerian Pertanian, 2015).

Tabel 1.6
Alih Guna, Penambahan, dan Neraca Lahan Sawah Tahun 1981-2012 (Ha)

Nomor	Wilayah	Konversi	Penambahan Lahan	Neraca
1. Tahun 1981-1999				
1.1	Jawa	1.002.055	518.224	-483.831
1.2	Luar Jawa	625.459	2.702.939	2.077.480
1.3	Indonesia	1.627.514	3.221.163	1.593.649
2. Tahun 1999-2002				
2.1	Jawa	167.150	18.024	-149.125
2.2	Luar Jawa	396.009	121.278	-274.732
2.3	Indonesia	563.159	139.302	-423.857
3. Tahun 2003-2012				
3.1	Jawa	26.720	158.274	131.554
3.2	Luar Jawa	271.405	397.119	125.714
3.3	Indonesia	298.125	555.393	257.268

Sumber: Gatot (2016)

Tingkat alih fungsi lahan pertanian ke lahan bukan pertanian di Indonesia masih sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai konversi lahan pertanian Indonesia, yaitu 1.627.514 Ha pada periode 1981-1999; 563.159 Ha pada periode 1999-2002; dan 298.125 Ha pada periode 2003-2012. Mirisnya, tingginya konversi lahan tersebut tidak diikuti dengan penambahan luas lahan oleh pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam neraca lahan pertanian di Indonesia yang semakin mengalami penurunan, yaitu dari seluas 1.593.649 Ha pada periode 1981-1999 menjadi hanya 257.268 Ha pada periode 2003-2012.

Tabel 1.7
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang dikuasai Tahun 2003 dan 2013 (Rumah Tangga)

No.	Golongan Luas Lahan (m ²)	ST 2003	ST 2013	Perubahan	
				Absolut	%
1.	<1.000	9.380.300	4.338.847	-5.041.453	-53,75
2.	1.000–1.999	3.602.348	3.550.185	-52.163	-1,45
3.	2.000–4.999	6 816 943	6.733.364	-83.579	-1,23
4.	5.000–9.999	4.782.812	4.555.075	-227.737	-4,76
5.	10.000–19.999	3.661.529	3.725.865	64.336	1,76
6.	20.000–29.999	1.678.356	1.623.434	-54.922	-3,27
7.	≥30.000	1.309.896	1.608.699	298.803	22,81
8.	Jumlah	31.232.184	26.135.469	-5.096.715	-16,32

Sumber: BPS (2013a)

Yustika dan Rukavina (2015:31-32) berpendapat bahwa dalam permasalahan utama penguasaan lahan di Indonesia ialah golongan petani yang didominasi oleh petani gurem (petani dengan lahan di bawah 0,5 hektar). Dominasi tersebut dapat dilihat dari hasil Sensus Pertanian (ST) 2013 yang menunjukkan bahwa rumah tangga usaha pertanian paling dominan adalah petani gurem, yaitu sebanyak 14,62 juta rumah tangga (55,948 persen) dari total 26.135.469 rumah tangga usaha pertanian. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 5.177.195 rumah tangga apabila dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian (ST) 2003. Namun, penurunan jumlah ini tidak mencerminkan perbaikan pada golongan petani gurem karena relatif tidak ada penambahan rumah tangga usaha pertanian dengan penguasaan lahan petani di atas 0,5 Ha.

Potensi untuk ketersediaan lahan pertanian sebenarnya cukup besar. Namun, pemerintah belum mampu memanfaatkan lahan-lahan potensial secara optimal. Hingga sekarang, masih tersedia banyak areal pertanian dan lahan potensial yang belum termanfaatkan. Kondisi ini sangat disayangkan karena Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km².

Tabel 1.8
Karakteristik dari Rumah Tangga Petani Beras di Indonesia Tahun 2007
(Rumah Tangga)

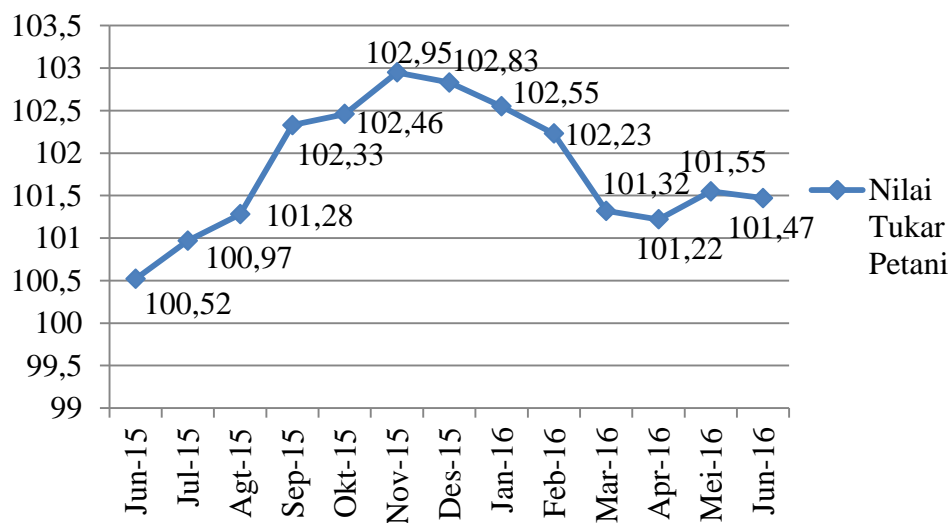
Wilayah	Petani Padi			Bukan	Total
	<i>Net Consumer</i>	<i>Net Producer</i>	Total	Petani Padi	
1. Perkotaan	468.101	1.295.589	1.763.690	21.633.220	23.396.910
	2%	5,5%	7,5%	92,5%	100%
2. Perdesaan	2.874.932	8.772.530	11.647.462	19.299.787	30.947.249
	9,3%	28,2%	37,5%	62,5%	100%
3. Total	3.343.033	10.068.119	13.411.152	40.933.007	54.344.159
	6,2%	18,4%	24,6%	75,4%	100%

Sumber: Arifin (2015: 85)

Alih fungsi lahan produktif pada sektor pertanian tersebut berpengaruh terhadap karakteristik dari rumah tangga petani beras di Indonesia. Rumah tangga di Indonesia 75,4 % adalah rumah tangga bukan produsen beras dan hanya tinggal 24,6% saja yang merupakan produsen beras. Persentase *net producer* dari petani padi di Indonesia juga sangat rendah, yaitu hanya 18,4%. Bahkan, persentase penduduk desa yang merupakan *net producer* padi di Indonesia hanya 28,2 %.

Kedua, kondisi kesejahteraan petani. Posisi petani dalam strata pendapatan tenaga kerja di Indonesia selalu berada di posisi yang terendah. Kondisi pendapatan petani yang rendah tersebut disebabkan oleh efisiensi produksi dalam usaha tani yang rendah. Efisiensi produksi usaha tani rendah karena kepemilikan lahan petani yang sempit, teknologi dalam bertani yang masih sederhana, dan peralatan pertanian yang masih terbatas. Kondisi akan menjadi lebih buruk lagi ketika lahan garapan pertaniannya adalah milik orang lain yang harus dibayar dengan uang sewa atau bagi hasil (Prayitno dan Lincoln, 1987:99).

Grafik 1.2
Nilai Tukar Petani Indonesia Periode Juni 2015-Juni 2016



Sumber: BPS (2016)

Kondisi kesejahteraan petani dapat diukur dengan menggunakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Perkembangan NTP semester pertama tahun 2016 secara umum mengalami penurunan, yaitu 102,55 pada Januari; 102,23 pada Februari; 101,32 pada Maret; 101,22 pada April; 101,55 pada Mei; dan 101,47

pada Juni. Nilai Tukar Petani sempat mengalami peningkatan pada Mei 2016. Namun, Nilai Tukar Petani kembali mengalami penurunan pada Juni 2016. Tingkat kesejahteraan petani yang rendah inilah yang akhirnya membuat petani mencari tambahan pendapatan dari luar usaha tani.

Tabel 1.9
Perubahan Komposisi Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan Tahun 1983, 1993, dan 2002 (Ribuan Rupiah, Harga Konstan 1993)

Nomor	Sumber Pendapatan	1983	1993	1993	2002
1.	Upah atau gaji	306,9 (22,1%)	387 (22%)	682,4 (29,1%)	805,3 (30,9%)
2.	Pertanian	785,4 (56,5%)	880 (50%)	673,5 (28,8%)	901,9 (34,5%)
3.	Luar Pertanian	154,6 (11,1%)	200 (11,4%)	469,5 (20%)	539,1 (20,7%)
4.	Penyewaan Aset	122,4 (8,8%)	195,2 (11,1%)	295,6 (12,6%)	165,2 (6,3%)
5.	Kiriman (<i>transfer</i>)	-	67,9 (3,9%)	83,6 (3,6%)	207,4 (7,9%)
6.	Transaksi Keuangan	-	-	138,3 (5,9%)	26,1 (1%)
Total Pendapatan		1.390,4	1.760	2.342,7	2.609,4
Kemiskinan Perdesaan		-	-	13,8%	21,1%

Sumber: Arifin (2015:67)

Arifin (2015:66-69) berpendapat bahwa peran pendapatan luar usaha tani (*off-farm income*) telah menjadi komponen penting bagi ekonomi rumah tangga petani sejak dua dekade terakhir. Pada periode tahun 1983-1993, persentase pendapatan rumah tangga perdesaan yang berasal dari usaha tani masih di atas 50% namun

pergeseran terjadi pada periode sepuluh tahun terakhir (1993-2002) di mana pendapatan dari luar pertanian meningkat pesat. Pada tahun 2002, pendapatan dari luar pertanian telah mencapai 20,7 % sedangkan pertanian tinggal 34,5 %. Perubahan komposisi pendapatan rumah tangga perdesaan ini harus menjadi perhatian dalam pembangunan pertanian di Indonesia.

Tabel 1.10
Nilai Perdagangan Impor dari Dalam dan Luar Asia Tenggara untuk
Komoditas Pertanian Tahun 2011 (dalam US\$ 1.000)

Nilai Impor ke Asia Tenggara				
Nomor	Negara	Impor dari Asia Tenggara	Impor dari Luar Asia Tenggara	Total Impor
1.	Brunei	-	338.228	338.228
2.	Kamboja	-	1.302.775	1.302.775
3.	Indonesia	4.096.281	16.896.768	20.993.049
4.	Laos	-	500.308	500.308
5.	Malaysia	6.481.101	15.911.294	22.392.395
6.	Myanmar	-	1.600.442	1.600.442
7.	Filipina	1.969.467	6.670.843	8.640.310
8.	Singapura	4.353.019	11.905.266	16.258.285
9.	Thailand	1.708.984	8.590.293	10.299.277
10.	Vietnam	-	10.922.467	10.922.467

Sumber: Subejo (2014:18-19)

Ketiga, impor terhadap komoditas pertanian. Kondisi menyempitnya luas lahan pertanian dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani tersebut berdampak terhadap impor komoditas pertanian di Indonesia. Pada tahun 2011, Indonesia berada pada peringkat negara kedua terbesar di kawasan ASEAN yang melakukan impor perdagangan pertanian. Total impor komoditas pertanian Indonesia baik

dari negara ASEAN maupun luar ASEAN adalah sebesar US\$ 20.993.049.000. Jumlah impor Indonesia jauh lebih besar apabila dibandingkan Thailand yang nilai total impornya hanya mencapai US\$ 10.299.277.000. Kondisi seperti ini sangatlah disayangkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi di sektor pertanian.

Tabel 1.11
Produk Domestik Bruto Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012-2015 (Miliar Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Berlaku				Harga Konstan 2010			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	119.706,87	131.450,71	140.621,92	157.498,1	106.536,7	108.832,11	107.793,38	113.825,92
B. Pertambangan dan Penggalian	14.734,64	16.069,72	19.621,17	23.019,68	13.745,87	14.594,16	15.542,65	16.099,87
C. Industri Pengolahan	263.739,83	292.260,73	331.604,5	357.508,67	241.528,86	254.694,12	271.561,47	284.100,06
D. Pengadaan Listrik, Gas	744,86	768,19	800,28	814,9	751,16	813,6	843,87	815,71
E. Pengadaan Air	551,25	567,12	601,32	632,7	547,79	549,04	567,98	577,26
F. Konstruksi	76.406,87	83.050,23	93.449,79	103.406,45	70.034,62	73.465,92	76.681,88	81.286,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	107.277,97	115.983,88	124.861,68	135.032,84	101.058,61	105.825,31	110.809,19	115.432,84
H. Transportasi dan Pergudangan	21.186,1	23.658,24	27.484,36	31.008,59	20.818,47	22.760,15	24.802,18	26.762,2
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.358,36	24.487,54	27.853,12	31.294,64	20.871,6	21.812,57	23.465,64	25.129,78
J. Informasi dan Komunikasi	24.438,25	25.807,43	28.403	30.511,26	24.690,22	26.663,58	30.130,16	33.001,27
K. Jasa Keuangan	21.440,93	23.426,2	25.549,68	28.912,16	18.588,74	19.311,45	20.115,57	21.745,56
L. Real Estate	12.235,49	13.319,14	15.037,14	16.749,47	11.934,42	12.853,22	13.776,86	14.822,3
M,N. Jasa Perusahaan	2.297,34	2.701,39	3.027,95	3.498,01	2.087,13	2.340,12	2.534,62	2.780,94
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22.918,63	24.638,14	26.406,08	28.925,62	20.373,58	20.912,83	21.075,65	22.194,69
P. Jasa Pendidikan	28.271,77	33.525,59	38.656,23	42.198,73	22.760,88	24.930,59	27.466,22	29.410,48
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.759,47	6.489,26	7.535,88	8.425,87	4.959,38	5.312,61	5.907,51	6.324,02
R,S,T,U. Jasa lainnya	10.460,79	11.812,51	13.680,63	14.636,52	10.055,07	10.983,73	11.917,82	12.300,03
Produk Domestik Regional Bruto	754.529,44	830.016,02	925.194,73	1.014.074,2	691.343,12	726.655,12	764.992,65	806.609,02

Sumber: BPS (2016)

Seperti kondisi nasional, pembangunan sektor pertanian di Jawa Tengah juga mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga masalah utama, yaitu kontribusi sektor pertanian dalam PDRB, kontribusi sektor pertanian dalam tenaga kerja, dan kesejahteraan petani di sektor pertanian. *Pertama*, sektor pertanian merupakan sektor yang termasuk dalam tiga sektor penyumbang terbesar PDRB di Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian di Jawa Tengah yang berhasil menyumbang Rp 113.825,92 miliar pada tahun 2015.

Namun, permasalahannya adalah laju pertumbuhan sektor pertanian Jawa Tengah mengalami *trend* perlambatan. Kondisi perlambatan tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan sektor pertanian Jawa Tengah dalam periode lima tahun terakhir, yaitu 3,04 (2012); 2,15 (2013); -0,95 (2014); dan 5,6 % (2015). Pembinaan pada sektor pertanian harus segera dilakukan karena hanya sektor pertanian yang laju pertumbuhannya pada tahun 2014 telah negatif sedangkan sektor lainnya masih positif meskipun mengalami perlambatan.

Kedua, sektor pertanian masih merupakan sektor yang terbanyak dalam menyerap tenaga kerja di Jawa Tengah. Sektor pertanian berhasil menyerap sebesar 26,66 % dari total 16.435.14 orang tenaga kerja di Jawa Tengah pada tahun 2015. Namun, permasalahannya adalah jumlah tenaga kerja yang masuk ke dalam sektor pertanian selalu mengalami penurunan setiap periodenya. Penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian tersebut secara berurutan dari 5.190.613 orang pada Februari 2014; 5.173.986 orang pada Agustus 2014; 5.388.260 orang pada Februari 2015; dan 4.709.707 orang pada Agustus 2015.

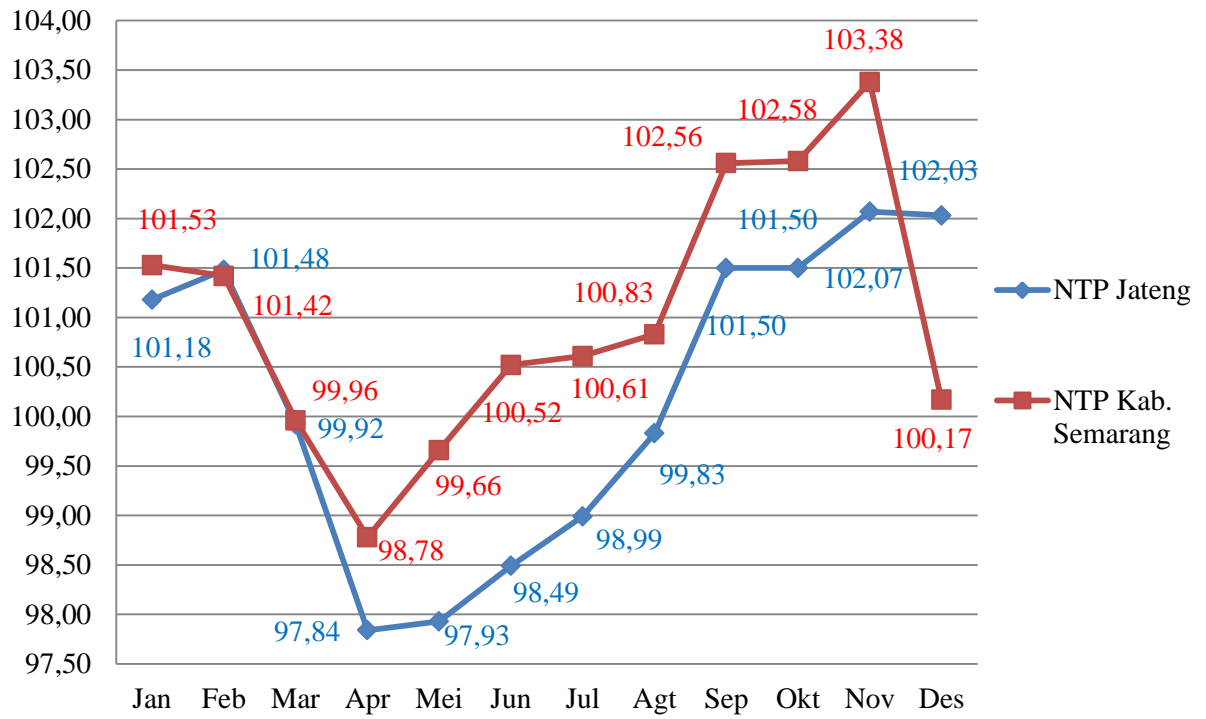
Tabel 1.12
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan
Pekerjaan Utama Tahun 2014-2015 (Orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2014		Tahun 2015	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1. Pertanian	5.190.613	5.173.986	5.388.260	4.709.707
2. Pertambangan	124.306	87.212	142.462	124.545
3. Industri	3.313.028	3.173.217	3.328.466	3.267.676
4. Listrik, Gas, dan Air	39.144	27.989	32.231	33.925
5. Bangunan	1.310.327	1.269.113	1.335.860	1.529.103
6. Perdagangan	3.722.886	3.715.488	4.012.448	3.803.763
7. Angkutan dan Pergudangan	547.294	587.391	491.964	547.674
8. Keuangan dan Jasa	357.966	322.402	305.163	343.870
9. Jasa Kemasyarakatan	2.145.411	2.193.884	2.285.171	2.074.879
10. Jumlah	16.750.975	16.550.682	17.322.025	16.435.142

Sumber: BPS (2016)

Ketiga, kondisi kesejahteraan petani. Indikator yang dapat digunakan untuk mencerminkan kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani di Jawa Tengah setelah bulan April 2015 relatif mengalami peningkatan dalam periode Januari- Desember 2015. Namun, tingkat kesejahteraan petani di Jawa Tengah secara umum masih berada di dalam kategori rendah. Hal ini karena nilai NTP Jawa Tengah selama 6 bulan selalu berada di bawah nilai 100, di mana nilai di bawah 100 memiliki makna bahwa petani belum pada kondisi yang sejahtera. Kondisi Nilai Tukar Petani Jawa Tengah pada tahun 2015 berada pada titik terendah sebesar 97,84 pada April dan berada pada titik tertinggi sebesar 102,7 pada November.

Grafik 1.3
Nilai Tukar Petani Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2015



Sumber: BPS (2016).

Kondisi rendahnya kesejahteraan petani di Jawa Tengah ini disebabkan karena mayoritas petani di Jawa Tengah merupakan petani gurem. Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan di bawah 0,5 Ha masih tinggi meskipun apabila dibandingkan dengan tahun 2003 jumlahnya mengalami penurunan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan di bawah 0,5 Ha pada tahun 2013 adalah sebanyak 3.312.235 (77,7 %) dari total 4.290.619 rumah tangga petani. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila jumlah kemiskinan di perdesaan yang mayoritas merupakan petani masih sangat tinggi, yaitu 2.716.200 orang pada September 2015 (BPS, 2013b).

Tabel 1.13
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Luas Lahan yang
Dikuasai di Jawa Tengah Tahun 2003 dan 2013 (Rumah Tangga)

No	Golongan Luas Lahan (m ²)	ST 2003	ST 2013	Pertumbuhan	
				Absolut	%
1.	<1.000	2.187.774	865.987	-1.321.787	-60,42
2.	1.000–1.999	912.343	921.001	8.658	0,95
3.	2.000–4.999	1.602.712	1.553.181	-49.531	-3,09
4.	5.000–9.999	759.977	681.252	-78.725	-10,36
5.	10.000–19.999	247.838	214.041	-33.797	-13,64
6.	20.000–29.999	39.684	35.017	-4.667	-11,76
7.	≥30.000	20.473	20.140	-333	-1,63
8.	Jumlah	5.770.801	4.290.619	-1.480.182	-25,65

Sumber: BPS (2013b)

Pembangunan pertanian di Indonesia pernah memasuki masa keemasannya pada periode 1980-1989. Produksi pertanian padi Indonesia pernah mengalami peningkatan rata-rata 5,32% per tahun dan puncaknya adalah swasembada beras pada tahun 1984. Keberhasilan pembangunan sektor pertanian tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja di Indonesia. Namun, masa keemasan tersebut tidak berlangsung lama karena laju pertumbuhan produktivitas padi Indonesia mengalami penurunan hingga menjadi negatif pada periode 1996–2000. Hal ini disebabkan pembangunan pertanian dalam upaya meningkatkan produktivitas padi dilakukan dengan program intensifikasi pertanian menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia tersebut telah menyebabkan penurunan kesuburan yang berdampak pada penurunan produktivitas pertanian Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian organik mulai dikembangkan di Indonesia (Maulana *et al.*, 2006; Situmorang, *et al.*, 2012; Ristianingrum, *et al.*, 2016).

Henny Mayrowani (2012) berpendapat bahwa pembangunan pertanian organik merupakan pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan. Hal ini karena pertanian organik menggunakan teknik budidaya pertanian dengan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, Sununtar Setboonsarng (2015) menjelaskan bahwa pembangunan pertanian organik berdampak pada peningkatan keanekaragaman hayati di sawah petani dan penurunan gas rumah kaca di atmosfer. Sejalan dengan Mayrowani dan Setboonsarng, hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunaratne (2015:270-271) menunjukkan bahwa sekitar 61% dari petani organik merasakan peningkatan dari keanekaragaman hayati di lahan pertanian mereka dengan melakukan pertanian organik.

Selain melestarikan alam, Henny Mayrowani (2012) berpendapat bahwa keberlanjutan pertanian organik juga tidak dapat dipisahkan dengan dimensi ekonomi. Petani pertanian organik memiliki keuntungan yang lebih tinggi daripada petani konvensional pada aspek ekonomi. Hal ini karena harga jual produk pertanian organik yang tinggi dan biaya usaha tani pertanian organik rendahnya. Biaya usaha tani dapat ditekan karena melimpahnya bahan-bahan alami yang dapat digunakan untuk membuat pupuk dan pestisida organik. Selain itu, pertanian organik juga merupakan sektor yang padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja di perdesaan (Sununtar Setboonsarng, 2015). Di Indonesia, berbagai hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertanian organik mampu meningkatkan pendapatan dari petani, seperti penelitian Trisanti (2002) di Kabupaten Klaten, Yanti (2005) dan Mayrowani, *et al* (2010) di Kabupaten

Sragen, Mulyaningsih (2010) dan Rachman, *et al* (2012) di Kabupaten Cianjur, Rahmawati, *et al* (2012) di Desa Surabaya, dan Rendy Wuysang (2014) di Desa Tincep.

Keuntungan-keuntungan dari pembangunan pertanian organik inilah yang menyebabkan pertanian organik menjadi salah satu sektor yang tumbuh paling cepat di dunia selama dekade terakhir (Henny Mayrowani, 2012; Sununtar Setboonsarng, 2015; Gunaratne, 2015:256; Ristianingrum, *et al.*, 2016). Laju pertumbuhan pertanian organik tersebut dapat dilihat dari luas lahan pertanian organik dunia yang telah mencapai luas 43.662.446 Ha. Dari keenam regional di dunia, Oceania merupakan regional yang paling besar dalam kontribusi luas lahan pertanian organik dunia hingga tahun 2014, yaitu mencapai 39,70% (17.342.416 Ha). Sedangkan, regional tiga regional lainnya yang masih memiliki potensi pada masa depan dalam kontribusi menyumbang lahan pertanian organik dunia, yaitu Afrika (2,90%), Amerika Utara (7,10%), dan Asia (8,20%).

Tabel 1.14
Luas Lahan Pertanian Organik Dunia Tahun 2014 (Ha)

Nomor	Regional	Lahan Pertanian Organik (Ha)	Kontribusi Regional terhadap Lahan Pertanian Organik Dunia
1.	Afrika	1.263.105	2,90%
2.	Asia	3.567.474	8,20%
3.	Eropa	11.625.001	26,60%
4.	Amerika Latin	6.785.796	15,50%
5.	Amerika Utara	3.082.419	7,10%
6.	Oceania	17.342.416	39,70%
7.	Total	43.662.446	100%

Sumber: FiBL (2016)

Pembangunan pertanian organik di regional Asia sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Somchai Jitsuchon dan Nuntaporn Methakunavut (2015:197) berpendapat bahwa Thailand telah melakukan pertanian organik secara tradisional selama ratusan tahun dan sebagian besar tetap dilakukan meskipun adanya revolusi hijau pada 1960-an. Dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian, Thailand telah mempromosikan pertanian organik melalui Agenda Nasional Pertanian Organik untuk tahun 2005-2009. Namun, hasil dari program tersebut kurang optimal karena kurangnya pemahaman dari dampak pertanian organik terhadap perekonomian secara keseluruhan.

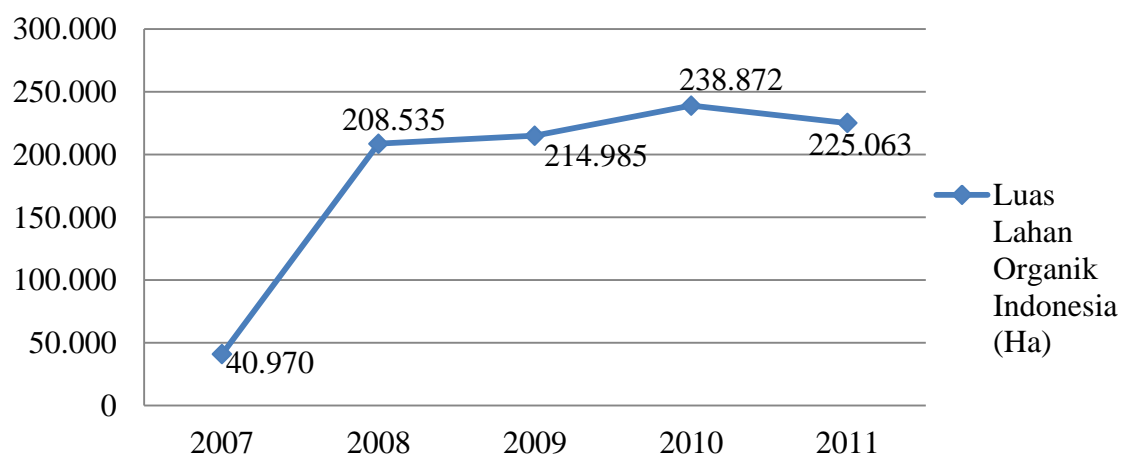
Sejalan dengan Thailand, Oudejans (2006) menjelaskan bahwa pertanian organik di Indonesia sebenarnya telah terlaksana semenjak masa penjajahan Belanda, tetapi pada masa itu belum disadari secara penuh baik manfaat maupun istilahnya. Dengan demikian, konsep pertanian organik sebenarnya sudah menjadi kearifan lokal pada kebudayaan petani di Indonesia. Namun, pertanian organik kemudian ditinggalkan ketika bahan kimia mulai diterapkan di era revolusi hijau. Pertanian organik mulai kembali diperhatikan di era sekarang karena penggunaan bahan kimia telah terbukti merusak lingkungan di bidang pertanian (Sutanto, 2002).

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan program *Go Organic 2010* dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian organik. Namun, Mayrowani (2012) berpendapat bahwa pembangunan pertanian organik di Indonesia masih perlu lebih diintensifkan. Hal ini karena jumlah petani yang berminat dalam menerapkan pertanian dengan sistem pertanian organik masih sedikit. Oleh karena

itu, pemerintah, petani, akademisi, dan lembaga yang bergerak di bidang pertanian lainnya diharapkan dapat berkerja sama dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan pertanian organik di Indonesia.

Perkembangan pembangunan pertanian organik di Indonesia menunjukkan *trend* yang sangat positif dari tahun ke tahunnya (Henny Mayrowani, 2012). Perkembangan tersebut dapat dilihat berdasarkan penelitian yang dilakukan FiBL dan IFOAM serta AOI (Aliansi Organik Indonesia). *Pertama*, Indonesia berada pada posisi 7 dunia dalam peningkatan luas lahan organik pada tahun 2014 berdasarkan penelitian yang dilakukan FiBL dan IFOAM (2016). Luas lahan pertanian organik Indonesia pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 73 % (47.950 Ha) dari tahun sebelumnya yang luasnya hanya 65.688 Ha. Secara keseluruhan, Indonesia berada pada peringkat 43 dunia dan 4 Asia dengan luas lahan pertanian organik mencapai 113.638 Ha.

Grafik 1.4
Luas Lahan Organik Indonesia Tahun 2007-2011 (Ha)



Sumber: AOI (2012)

Dan *kedua*, perkembangan pembangunan pertanian organik di Indonesia berdasarkan penelitian oleh Aliansi Organik Indonesia (AOI) juga menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari luas areal pertanian organik yang mengalami peningkatan, yaitu dari 40.970 Ha pada tahun 2007 menjadi 225.062 Ha pada tahun 2011. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sebagai negara yang memiliki laju pertumbuhan lahan pertanian organik yang tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Perkembangan pembangunan pertanian organik juga dapat ditemui di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Jawa Tengah. Tujuan dilaksanakannya pembangunan pertanian organik di Desa Ketapang adalah untuk menurunkan kemiskinan di Desa Ketapang. Jumlah penduduk miskin yang ada di Desa Ketapang hingga tahun 2014 masih relatif tinggi, yaitu ada sebanyak 297 rumah tangga. Tingginya jumlah penduduk miskin ini disebabkan masih belum optimalnya strategi pembangunan pertanian di Desa Ketapang karena mayoritas penduduk miskin di Desa Ketapang merupakan petani. Oleh karena itu, pembangunan pertanian organik diharapkan mampu menjadi solusi untuk menurunkan kemiskinan masyarakat di Desa Ketapang.

Pembangunan pertanian organik di Desa Ketapang didukung oleh tiga potensi utama, yaitu luas lahan pertanian organik, jumlah tenaga kerja, dan modal sosial petani organik. *Pertama*, total luas lahan pertanian organik di Desa Ketapang mencapai 115,768 Ha. Total luas lahan pertanian organik ini dengan kata lain telah mencapai 72,36 persen dari total 160 Ha luas lahan pertanian di Desa Ketapang. *Kedua*, jumlah tenaga kerja yang bergerak pada pertanian organik di

Desa Ketapang telah mencapai 339 orang petani dari total 919 orang petani di Desa Ketapang. Jumlah petani organik yang relatif banyak ini membuat Gapoktan pertanian organik merupakan Gapoktan terbesar yang ada di Desa Ketapang.

Dan *ketiga*, pembangunan pertanian ini dikoordinir oleh suatu kelompok Paguyuban Petani, yaitu Al Barokah. Keunikan pembangunan pertanian organik oleh PP Al Barokah adalah pembangunan pertanian organik tidak hanya memanfaatkan modal alam dan ekonomi, tetapi juga memanfaatkan modal sosial petani, seperti nilai, norma, kepercayaan, jaringan sosial, gotong royong, dan kearifan lokal lainnya (Widiarta, 2011; Nuranto, 2013; dan Mahmud, 2014).

Gambar 1.1
Sawah Pertanian Padi Organik di Desa Ketapang



Sumber: Dokumentasi Lapangan

Fergus Lyon (2000), Rokhani (2012), Utami (2014), serta Yustika dan Rukavina (2015; 190-191) berpendapat bahwa modal sosial sama pentingnya dengan modal alam dan ekonomi di dalam pembangunan. Pembangunan pada sektor pertanian memerlukan unsur modal sosial karena modal sosial merupakan faktor yang memiliki dampak penting dalam mempengaruhi kinerja perekonomian petani (Beugelsdijk dan van Schaik, 2005; Qio Liang, *et al.*, 2015). Hal tersebut

didukung oleh hasil penelitian Wuysang (2014) membuktikan bahwa terdapat hubungan antara modal sosial kelompok tani dengan tingkat pendapatan petani di Desa Tincep. Wuysang (2014) berpendapat bahwa apabila modal sosial (kepercayaan, jaringan sosial, norma, dan adat istiadat) dapat ditingkatkan maka tingkat pendapatan dari petani akan mengalami peningkatan.

Modal sosial juga berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan pertanian yang dihadapi oleh petani. Hal ini dijelaskan melalui penelitian oleh Pranadji (2006), Situmorang, *et al* (2012), Rokhani (2012), Cahyono dan Ardian (2012), dan Wibisono dan Darwanto (2016). Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya modal sosial bagi kelompok tani untuk dapat menyelesaikan permasalahan di dalam kegiatan pertanian. Dengan demikian, modal sosial merupakan variabel yang diperlukan dalam pembangunan pertanian organik.

Namun, pembangunan pertanian organik di Desa Ketapang memiliki empat permasalahan utama, yaitu lahan pertanian, alam, masyarakat, dan iptek. *Pertama*, permasalahan lahan pertanian yang dihadapi oleh petani PP Al Barokah adalah petani organik PP Al Barokah menghadapi permasalahan dalam hal konsolidasi lahan pertanian dengan petani anorganik. Selain itu, luas rata-rata lahan pertanian yang dimiliki oleh petani organik juga merupakan lahan sempit, yaitu hanya sekitar 0,1 Ha hingga 0,2 Ha. Di saat yang bersamaan, pertanian organik juga menghadapi ancaman konversi lahan dari lahan pertanian ke bukan pertanian.

Kedua, permasalahan alam yang dihadapi oleh petani PP Al Barokah adalah adanya serangan hama dan rusaknya infrastruktur pertanian di Desa Ketapang.

Pertanian organik di Desa Ketapang pernah mengalami serangan hama tikus yang mengakibatkan petani organik mengalami gagal panen. Selain itu, petani organik juga mengalami permasalahan akan jebolnya infrastruktur pertanian berupa saluran induk air yang disebabkan longsohnya tanah akibat meningkatnya intensitas hujan di Desa Ketapang. Jebolnya saluran induk air ini mengakibatkan petani organik mengalami kesulitan dalam dialirkan air ke lahan pertanian organik sehingga mengganggu produksi usaha tani pertanian organik.

Ketiga, permasalahan masyarakat yang dihadapi oleh petani PP Al Barokah. Permasalahan dalam aspek masyarakat yang dihadapi oleh pertanian organik adalah petani organik mengalami adanya penolakan dari petani anorganik, istri, dan kebijakan pemerintah. Permasalahan dalam aspek dalam masyarakat ini relatif memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses penyelesaiannya dibandingkan tiga permasalahan lainnya karena berkaitan dengan mengubah manusia. Dan *keempat*, permasalahan iptek yang dihadapi oleh petani PP Al Barokah adalah iptek dalam bentuk pupuk kimia dan pestisida kimia merupakan masalah di dalam pembangunan pertanian organik di Desa Ketapang. Hal ini karena pupuk kimia dan pestisida kimia dari petani anorganik dapat mengontaminasi pertanian dari petani organik PP Al Barokah baik melalui air maupun hembusan angin.

Petani PP Al Barokah mengatasi keempat permasalahan tersebut dengan memanfaatkan modal sosial. Modal sosial yang dimanfaatkan oleh petani PP Al Barokah bersumber dari empat sumber utama, yaitu nilai, norma, kepercayaan, dan jaringan. Modal sosial petani PP Al Barokah di dalam pertanian organik tercermin dari adanya kegiatan musyawarah oleh petani PP Al Barokah ketika

pengambilan keputusan di dalam kelompok, adanya kegiatan *Merti Dusun* yang masih dipertahankan oleh petani PP Al Barokah, dan adanya gotong royong petani PP Al Barokah di dalam kegiatan usaha tani, seperti memburu hama tikus, membuat pupuk organik, dan membuat pestisida organik secara bersama-sama.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, terlihat jelas bahwa pembangunan pertanian organik di Desa Ketapang mengalami berbagai permasalahan yang perlu segera diatasi. Pembangunan dengan sistem pertanian organik diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan pertanian tersebut. Pembangunan pertanian organik yang dilakukan diharapkan memasukkan unsur modal sosial masyarakat dalam faktor *input* pembangunan pertanian karena modal sosial merupakan kajian yang menarik dan penting dalam pembangunan dengan semakin berkembangnya aliran ekonomi kelembagaan (Santosa, 2014: 109). Asti Kurnia Sari (2012), Santosa dan Darwanto (2015), serta Candra Nuraini, *et al* (2016) telah melakukan penelitian ekonomi kelembagaan dalam bidang pertanian untuk mengembangkan strategi pembangunan di sektor pertanian. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan pertanian organik berbasis modal sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Desa Ketapang merupakan salah satu desa yang berpotensi untuk mengembangkan pembangunan pada sektor pertanian di Kecamatan Susukan. Hal ini dibuktikan penggunaan lahan dan tenaga kerja yang hingga sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian. Jumlah luas penggunaan lahan untuk

persawahan di Desa Ketapang mencapai 160 Ha dari total 316 Ha dan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di Desa Ketapang mencapai 46,79 persen dari total 1.964 orang tenaga kerja. Namun, permasalahannya adalah tingkat kesejahteraan petani di Desa Ketapang masih rendah. Oleh karena itu, konsep pembangunan pertanian yang tepat diperlukan untuk mengembangkan pertanian di Desa Ketapang.

Pembangunan pertanian organik yang dikoordinir oleh Paguyuban Petani Al Barokah diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Ketapang. PP Al Barokah dalam membangun pertanian organik memanfaatkan modal sosial yang ada pada petani, seperti prinsip nilai-nilai, norma, kepercayaan, jaringan sosial, dan kearifan lokal lainnya. Namun, pembangunan pertanian organik di Desa Ketapang memiliki empat masalah utama yang perlu diatasi, yaitu *Pertama*, permasalahan lahan pertanian yang dihadapi oleh petani PP Al Barokah adalah petani organik mengalami permasalahan dalam hal konsolidasi lahan pertanian dengan petani anorganik. Selain itu, luas rata-rata lahan pertanian yang dimiliki oleh petani organik juga merupakan lahan sempit, yaitu hanya sekitar 0,1 Ha hingga 0,2 Ha. *Kedua*, permasalahan alam yang dihadapi oleh petani PP Al Barokah adalah adanya serangan hama dan rusaknya infrastruktur pertanian di Desa Ketapang. Pertanian organik di Desa Ketapang pernah mengalami serangan hama tikus yang mengakibatkan petani organik mengalami gagal panen.

Ketiga, permasalahan masyarakat yang dihadapi oleh petani PP Al Barokah. Permasalahan dalam aspek masyarakat yang dihadapi oleh pertanian organik

adalah petani organik mengalami adanya penolakan dari petani anorganik, istri, dan kebijakan pemerintah. Dan *keempat*, permasalahan iptek yang dihadapi oleh petani PP Al Barokah adalah pupuk kimia dan pestisida kimia di dalam kegiatan pertanian di Desa Ketapang.

Permasalahan pembangunan pertanian organik di Desa Ketapang sejalan dengan pendapat dari Yustika dan Rukavina (2015:31). Yustika dan Rukavina (2015:31) berpendapat bahwa ada dua permasalahan mendasar di dalam ekonomi kelembagaan pertanian di Indonesia, yaitu permasalahan kepemilikan lahan petani dan posisi petani yang selalu kalah dan tersingkirkan. *Pertama*, kepemilikan luas lahan petani yang semakin kecil. Hayami dan Kikuchi (dalam Purwanto, 2015) melaporkan bahwa kepemilikan lahan rata-rata di Jawa kurang dari 0,5 hektar pada tahun 1980-an. Sekarang ini, rata-rata kepemilikan lahan hanya tinggal 0,25 hektar saja. Bahkan, Kementerian Pertanian (2015) menyebutkan bahwa luas penguasaan lahan per petani 0,22 hektar pada tahun 2012 dan diperkirakan akan menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050.

Menurut Gatot (2016:46-47), konversi lahan pertanian produktif menjadi lahan bukan pertanian merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak dapat dihindarkan di dalam proses transformasi ekonomi. Laju alih fungsi lahan produktif diprediksi sangat besar dalam sepuluh tahun terakhir. Hurrelmann (2008) berpendapat bahwa petani nekat menjual lahannya disebabkan mereka memiliki masalah keuangan, seperti beban biaya seperti pupuk, tenaga kerja, dan saprodi. Kondisi seperti tersebutlah yang pada akhirnya memaksa petani untuk merelakan lahan mereka menjadi lahan bukan pertanian.

Kedua, kondisi petani yang selalu kalah dan tersingkirkan. Soetomo (1997: 4-5) menyatakan bahwa tujuan pertama dan utama dalam pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan upaya pembebasan manusia yang berlangsung secara terus menerus. Terkait dengan pertanian, pembangunan pertanian merupakan upaya pembebasan dari manusia petani. Oleh karena itu, pembangunan pertanian tidaklah berupaya untuk menciptakan faktor produksi berupa manusia robot, melainkan berupaya untuk menciptakan manusia petani yang benar-benar merdeka.

Penelitian yang menyatakan kemiskinan petani disebabkan faktor rendahnya pendidikan petani, banyaknya jumlah anak petani, malasnya petani, dan tidak suburnya lahan tidak dapat disalahkan. Namun, akar permasalahan dari kemiskinan petani yang lebih mendesak kemiskinan struktural dari petani. Petani menjadi miskin tidak karena kemiskinan yang ada dengan sendirinya, melainkan oleh faktor-faktor yang membuat posisi petani selalu kalah dan termaginalkan. Faktor-faktor yang menyebabkan petani selalu kalah tersebut terdiri dari tiga, yaitu alam, masyarakat, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Pertama, faktor alam yang merupakan anugerah sekaligus kutukkan bagi petani. Alam dapat berperan sebagai anugerah dan juga kutukan pada saat yang bersamaan. Alam sebagai anugerah dapat memberikan dukungan bagi petani dalam melakukan usaha tani, seperti kondisi geografis yang menyediakan tanah humus dan iklim yang bersahabat. Namun, alam dapat juga menjadi kutukan bagi petani dalam melakukan usaha tani, seperti hama penyakit, hujan yang terus-menerus, dan banjir yang dengan sekejap mampu menghancurkan tanaman dari

petani. Alam sebagai kutukan tersebut tidak jarang disebabkan oleh manusia yang lebih dahulu tidak bersahabat dengan alam.

Dalam berhadapan dengan alam, petani tidak berdaya karena mereka hanya dapat mengendalikan alam dalam lingkup yang sangat terbatas. Oleh karena itu, petani berdasarkan jenisnya memiliki cara tersendiri yang berbeda dalam menghadapi keperkasaan alam tersebut. Petani yang masih tradisional akan menciptakan sebuah mitos sebagai upaya menekan gangguan-gangguan dari alam. Sedangkan, pertanian modern berusaha untuk lepas dari doktrin mitos dengan menciptakan kebudayaan ilmiah untuk menaklukkan alam (Soetomo, 1997:13-19).

Kedua, kemiskinan pada petani dapat disebabkan masyarakat. Masyarakat modern telah memosisikan petani sebagai sekrap dalam organisasi, administrasi, dan sistem. Dengan kondisi tersebut, pertanian dalam masyarakat modern telah menggeser kehidupan petani menjadi petani yang bergantung kepada unsur-unsur di luar dirinya. Petani diserbu habis-habisan oleh sistem kapitalis yang diwarnai dengan unsur birokrasi dan akumulasi modal. Dampaknya adalah situasi tersebut memicu berkembangnya ketidakadilan struktural yang menyebabkan posisi petani akan selalu menjadi tumbal dari usaha tani modern (Soetomo, 1997: 21-36).

Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam pertanian. Pada awalnya, iptek diharapkan sebagai solusi yang dapat memberikan pencerahan bagi petani tradisional yang berpedoman pada mitos-mitos dalam pertanian. Namun, iptek seiring berjalannya waktu kini malah menjadi sebuah mitos dan ideologi otoriter baru. Iptek telah berkembang menjadi alat manipulasi yang memaksakan

ajaran-ajarannya dalam memecahkan masalah pertanian. Dampaknya adalah iptek semakin menindas petani dalam pembangunan pertanian.

Iptek terbukti hingga kini belum mampu menghasilkan kesejahteraan dari petani karena dalam penerapannya ternyata memiliki jurang yang memisahkan antara dunia ilmuwan dan petani. Jurang pemisah tersebut tercermin dari dunia ilmuwan bergerak berdasarkan pola dan dinamikanya sendiri yang melesat jauh meninggalkan dunia petani. Para ilmuwan menganggap petani sebagai masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah yang tidak memiliki pengetahuan terhadap persoalan pertanian. Kondisi inilah yang menyebabkan hasil penelitian dari ilmuwan tidak jarang berakibat pada rekomendasi yang justru menyebabkan petani selalu kalah dan tersingkirkan (Soetomo, 1997: 37-38).

Selanjutnya, modal sosial penting di dalam pembangunan di suatu daerah. Purwanto (2015) menjelaskan bahwa modal sosial yang beragam dan unik pada masyarakat perdesaan seharusnya dapat dijadikan modal pendorong bagi pembangunan pertanian Indonesia. Modal sosial tersebut dapat berbentuk, seperti gotong-royong, kekerabatan, kemampuan beradaptasi, kewirausahaan, dan etos kerja petani. Namun, pembangunan selama ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran sosial budaya dan melemahkan modal sosial dalam pertanian. Misalnya, petani sudah mulai meninggalkan kebiasaan gotong-royong.

Santosa (2014: 273) berpendapat bahwa kondisi pada masing-masing daerah yang berbeda keadaan alam, sosial budaya, dan lingkungan seharusnya menjadi perhatian dalam pembangunan suatu daerah. Kegagalan pembangunan pada

berbagai daerah di Indonesia disebabkan pembangunan melakukan generalisasi dengan menggunakan teori Barat yang tidak cocok dengan keadaan setempat. Oleh karena itu, apabila pembangunan mau lebih disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada masing-masing daerah maka kearifan lokal masyarakat harus disertakan dalam pembahasan dalam pembangunan (Hasbullah, 2006: 107).

Berdasarkan gambaran di atas, penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan di dalam pembangunan pertanian organik dan menciptakan model ekonomi kelembagaan pertanian organik berbasis modal sosial di Desa Ketapang. Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya di Desa Ketapang ?
2. Bagaimana lahan pertanian, alam, masyarakat, dan iptek dalam pertanian padi organik di Desa Ketapang ?
3. Bagaimana peran modal sosial dalam mengatasi permasalahan pertanian padi organik di Desa Ketapang ?
4. Bagaimana model ekonomi kelembagaan pertanian organik berbasis modal sosial di Desa Ketapang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya di Desa Ketapang;

2. Menjelaskan lahan pertanian, alam, masyarakat, dan iptek di dalam pertanian padi organik di Desa Ketapang;
3. Menjelaskan peran modal sosial di dalam mengatasi permasalahan pertanian padi organik di Desa Ketapang; dan
4. Membentuk model ekonomi kelembagaan pertanian organik berbasis modal sosial di Desa Ketapang.

Selain itu, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan lebih lanjut sebagai bahan kajian pustaka penulisan maupun penelitian mengenai topik sejenis sehingga dapat memperkaya dan memberikan sumbangan kepada penelitian selanjutnya;

2. Aspek Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian organik berbasis modal sosial di Indonesia. Model ekonomi kelembagaan pertanian organik yang dihasilkan diharapkan mampu membangun aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di perdesaan Indonesia

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan pembangunan pertanian yang terjadi di Indonesia, Jawa Tengah, dan Desa Ketapang. Selain itu, bab ini menjelaskan pentingnya modal sosial dalam pemecahan permasalahannya. Selanjutnya, bab ini berisikan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;
2. Bab telaah pustaka. Bab ini berisikan kajian teori yang mengacu kepada penelitian. Selanjutnya, bab ini menambahkan penelitian terdahulu dan kerangka berpikir untuk memperkuat arah penelitian;
3. Bab metode penelitian. Bab ini berisikan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, seperti pemilihan pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi serta waktu penelitian, batasan dan fokus masalah penelitian, dan validitas dan reliabilitas data penelitian;
4. Bab pembahasan. Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai permasalahan dan solusi bagi kemajuan pertanian organik di Desa Ketapang, Kabupaten Semarang;
5. Bab penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian pada pembahasan penelitian dan saran yang direkomendasi untuk pihak terkait dengan penelitian tersebut.